

## **ALIRAN PENDIDIKAN PROGRESIVISME DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PANCASILA DI INDONESIA**

Reno Wikandaru \*

### ***Abstrak***

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara membawa implikasi besar, yakni bahwa Pancasila perlu dijabarkan baik sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup, maupun sebagai filsafat negara (*philosofisch grondslag*). Namun demikian, permasalahan besar justru muncul di era reformasi inikarena kenyataannya Pancasila justru semakin jauh ditinggalkan. Faktor pendidikan menjadi faktor yang memiliki peran besar dalam persoalan ini.

Berdasarkan kajian fenomenologis yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, satu persoalan besar yang menyebabkan “gagalnya” pendidikan Pancasila adalah karena pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat. Metode ini oleh karenanya perlu disempurnakan dengan “belajar” pada aliran progresivisme pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Proses belajar perlu mengakomodasi peran pengalaman tersebut dengan menghadirkan contoh kasus yang konkret dan empiris, sehingga dengan mengalami, peserta didik akan lebih mengerti dan memahami.

Kata kunci: pendidikan Pancasila, metode pembelajaran, pengalaman, progresivisme,

## A. Pendahuluan

Negara, sebagai suatu entitas kolektif, adalah ibarat sebuah ‘organisme’ besar yang terdiri atas sejumlah besar manusia yang memiliki tujuan bersama. Negara, oleh karenanya juga memerlukan sebuah pandangan hidup sebagai kerangka berpikir kolektif yang berisi pandangan atau pemahaman negara mengenai kehidupan yang sedang dijalani. Pandangan hidup ini merupakan sesuatu yang vital karena keberadaannya akan sangat menentukan strategi penyelenggaraan negara, sehingga eksistensi atau keutuhan negara bisa terjaga yang pada akhirnya akan menuju pada tercapainya tujuan bersama.

Indonesia, sebagai sebuah negara juga memiliki pandangan hidup yang dijabarkan dari dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka, melalui proses perumusan yang berliku. Dimulai sejak sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dan 10-17 Juli 1945, lalu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia

Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta, sampai akhirnya diputuskan sebagai dasar negara di dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini membawa banyak implikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila pun kemudian dijabarkan baik sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup, maupun sebagai filsafat negara (*philosophisch grondslag*). Penjabaran dan pemaknaan Pancasila tersebut dilakukan agar Pancasila bisa benar-benar menjadi dasar bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut bisa diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan.

M. Sastrapratedja mengemukakan bahwa agar Pancasila sebagai dasar negara bisa diimplementasikan dan dikontekstualisasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai ‘mediasi’, antara lain interpretasi, internalisasi dan sosialisasi (melalui pendidikan), dan melalui

institusioalisasi yang menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang terlembaga (Sastrapratedja, 2007: 26). Gagasan Sastrapratedja tersebut sebenarnya sudah dapat dilihat dalam pengembangan yang sudah dilakukan selama ini yaitu dijadikannya Pancasila sebagai salah satu objek kajian di lingkungan akademik, baik dalam bentuk pengajaran pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan di Indonesia, maupun dalam bentuk kajian mengenai Pancasila yang lebih diarahkan sebagai upaya interpretasi, penjabaran yang lebih luas, dan penggalian yang lebih dalam mengenai nilai-nilai di dalam Pancasila tersebut. Arah dan tujuan dari upaya sosialisasi dan implementasi Pancasila sudah sangat jelas, yaitu agar Pancasila bisa diamalkan atau diimplementasikan baik secara objektif maupun secara subjektif.

Upaya sosialisasi Pancasila melalui pendidikan sudah bisa dilihat bersama di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang memberikan porsi untuk pengajaran Pancasila kepada peserta didik. Pendidikan Pancasila, sudah

diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran dalam berbagai kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Pendidikan Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi bahkan sudah 'selangkah lebih jauh' karena kajian filsafati atas Pancasila juga ikut disosialisasikan dalam bentuk mata ajaran filsafat Pancasila, yang mengupas lebih mendalam mengenai aspek-aspek filsafati yang bisa dijumpai di dalam dasar negara Indonesia tersebut. Namun demikian, permasalahan besar justru muncul berkaitan dengan sosialisasi dan upaya implementasi Pancasila, khususnya secara subjektif tersebut, karena kenyataannya Pancasila justru semakin jauh ditinggalkan. Pendidikan Pancasila cenderung dianggap tidak penting, bahkan fenomena yang muncul di masyarakat, peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan sudah tidak lagi hafal bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Persoalan ini tentu merupakan persoalan yang serius dalam kaitannya dengan upaya sosialisasi dan implementasi Pancasila, terutama dalam upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila

dalam diri masing-masing individu warga negara Indonesia. Tendensi untuk meninggalkan Pancasila semakin menguat di era reformasi.

Berbagai spekulasi untuk mengidentifikasi pangkal permasalahan ini pun kemudian muncul, dan bagi penulis, faktor pendidikan menjadi faktor yang memiliki peran besar dalam persoalan ini. Seperti yang diketahui bersama, pendidikan Pancasila sudah diberikan mulai dari pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi, namun kenyataannya internalisasi dari nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan individu tidak juga berhasil. Fenomena yang menunjukkan tendensi itu bisa dilihat dengan jelas dari kejadian-kejadian di tengah-tengah masyarakat. Melunturnya spiritualitas, hilangnya rasa kemanusiaan, tendensi chauvinistik, terlupakannya kerakyatan, dan keadilan yang seakan menjadi sangat utopis, adalah contoh nyata dari belum berhasilnya upaya implementasi Pancasila. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah ada yang salah dengan pendidikan Pancasila yang selama ini diajarkan? Pertanyaan ini tentu

sangat relevan dalam kajian pendidikan, khususnya filsafat pendidikan, karena salah satu kajian filsafat pendidikan adalah mengkaji asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari berbagai macam filsafat dan aliran pendidikan. Kajian filsafat pendidikan oleh karenanya sangat berguna di dalam mencari format pendidikan seperti apa yang akan bisa diterapkan di dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini kiranya penting karena sebagaimana dikemukakan oleh Dardiri, pendidikan juga perlu menaruh perhatian pada persoalan nilai (Dardiri:9), dan dalam hal ini, Pancasila juga berkaitan dengan nilai-nilai. Tujuan pembahasan ini oleh karenanya menjadi jelas, yaitu untuk mengketengahkan salah satu aliran di dalam filsafat pendidikan yang bisa digunakan di dalam upaya pengembangan pendidikan Pancasila yang semakin lama semakin memperlihatkan kegagalannya.

## **B. Pandangan Aliran Progresivisme Mengenai Pendidikan**

Sesuai dengan namanya,

*Aliran Pendidikan Progresivisme dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Pendidikan Pancasila di Indonesia*

aliran atau teori pendidikan progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana “kemajuan” atau liberasi peserta didik. Kemajuan atau progres tersebut adalah kemajuan dalam arti bahwa pendidikan yang dilakukan oleh aliran ini beranjak dari aliran pendidikan tradisional yang selalu menekankan pada otoritas pendidik dan otoritas teks yang berlebihan. Menurut progresivisme, pendidikan “otoriter” semacam itu memiliki banyak kelemahan karena secara ontologis, pandangan tersebut memang sudah keliru. Bagi progresivisme, manusia secara kodrati sudah dibekali dengan berbagai kemampuan, sehingga secara kodrati juga sudah dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang menekan atau mengancam keberadaannya (Barnadib, 1997:28). Pendidikan yang otoriter menurut progresivisme akan mengalami kegagalan dan hanya akan menghadapi berbagai kesulitan dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang baik, karena tidak memberi ruang yang semestinya kepada kemampuan manusia yang

sebenarnya justru merupakan “motor penggerak” atau daya kreatif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan.

Bertolak dari keberadaan teori pendidikan tradisional yang memberikan porsi berlebihan bagi otoritas pendidik dan cara belajar pasif yang hanya fokus pada kajian tekstual, aliran progresivisme berkembang dan menawarkan perspektif, cara, dan metode yang baru dalam sistem pembelajaran. Asumsi pokok dari aliran ini adalah bahwa dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses belajar, peserta didik akan mampu membuat kemajuan, karena dengan kebebasan, potensi manusia untuk maju dan berkembang bisa berjalan dengan optimal. Sesuai dengan asumsi tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ornstein dan Levine, progresivisme pendidikan merumuskan beberapa prinsip umum berkaitan dengan metode pembelajaran, yaitu *pertama*, peserta didik seharusnya memiliki kebebasan untuk berkembang secara natural; *kedua*, ketertarikan (*interest*) merupakan stimulus yang paling bagus bagi proses belajar; *ketiga*,

pendidik haruslah berperan sebagai pembimbing atau pemandu proses belajar; *keempat*, harus ada kerja sama yang bagus antara antara pihak orang tua dengan pihak sekolah; dan *kelima*, institusi pendidikan juga harus berperan sebagai laboratorium bagi reformasi dan eksperimentasi pendidikan (Ornstein, 1985:203).

Berdasarkan beberapa prinsip pokok yang diuraikan di atas, tampak bahwa aliran pendidikan progresivisme ini mendasarkan teori pendidikannya pada filsafat pendidikan pragmatisme yang menekankan pentingnya aspek pengalaman di dalam proses belajar (*learning by doing*). Oleh karenanya, sebagaimana bisa dijumpai di dalam aliran pragmatisme, teori pendidikan progresivisme juga mengusung metode pendidikan alternatif yang memanfaatkan aktivitas peserta didik, serta mendasarkan proses pembelajaran pada pengalaman dan pemecahan masalah (*problem solving*) (Ornstein, 1985:203). Murid, oleh aliran progresivisme bukan ditempatkan sebagai subjek pendidikan, melainkan sebagai “orang yang belajar” (peserta didik/*learner*). Asumsi mengenai

peserta didik tersebut membawa implikasi tersendiri karena bagi progresivisme pendidikan, pendidikan lebih ditempatkan sebagai aktivitas dan pengalaman daripada sebagai pembelajaran verbal dan literal, yang pada akhirnya hanya akan melahirkan proses pendidikan yang individual dan kompetitif (Ornstein, 1985:203).

Berkaitan dengan peran institusi pendidikan di dalam proses belajar, progresivisme menempatkan sekolah atau institusi pendidikan sebagai tempat yang memberikan kebebasan penuh kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen, dalam arti memperkaya pengalaman seluas-luasnya. Sesuai dengan aliran filsafat pendidikan yang mendasarinya, yakni pragmatisme, progresivisme pendidikan juga menekankan pentingnya proses belajar sebagai pembelajaran mengenai *problem solving*. Oleh karenanya, dalam rangka membekali peserta didik dengan kemampuan *problem solving* tersebut, sekolah juga menjadi tempat yang menyediakan semacam “simulasi” kepada peserta didik mengenai realitas yang biasa dihadapi dalam

kehidupan yang sebenarnya, dan kemudian memberi kebebasan kepada peserta didik untuk memecahkan persoalan yang diajukan tersebut. Peran institusi pendidikan yang semacam ini, menurut progresivisme sangatlah penting karena sejalan dengan asumsi dasar aliran ini mengenai nilai, progresivisme memiliki pandangan mengenai arti pentingnya konteks sosial dalam proses pembelajaran. Nilai tidaklah bersifat eksklusif karena keberadaannya bukan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Oleh karenanya berbagai jenis nilai, baik terkait dengan nilai kebenaran (soal pengetahuan), maupun nilai kebaikan (soal moral), dikatakan ada apabila menunjukkan adanya kecocokan dengan hasil eksperimentasi yang dialami manusia di dalam pergaulan hidup sehari-hari (Barnadib, 1997: 32). Inti dari uraian tersebut adalah bahwa dalam aliran pendidikan progresivisme, pengalaman menjadi media yang sangat penting bagi keberhasilan proses belajar. “Pengalaman adalah guru yang paling berharga”, oleh karenanya di dalam pelaksanaan proses

pendidikan, progresivisme berusaha sebisa mungkin menghadirkan suatu pengalaman di dalam proses belajar sehingga ketika nantinya peserta didik hidup di realitas masyarakat yang sebenarnya, mereka sudah memiliki pengalaman yang cukup mengenai bagaimana cara memecahkan berbagai macam persoalan. Dengan kata lain, melalui cara seperti ini, kemajuan atau *progress* manusia sebagai tujuan dari aliran progresivisme tersebut, benar-benar akan bisa dicapai karena liberasi manusia yang dicita-citakan juga bisa diwujudkan dalam proses pendidikan.

Kaitannya dengan kurikulum pendidikan, progresivisme sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk memberlakukan kurikulum yang baku di dalam proses pendidikan karena ketika peserta didik menjadi pusat perhatian, maka kurikulum juga semestinya berasal dari peserta didik, dalam arti sesuai dengan minat dan ketertarikan peserta didik (Barnadib, 1997: 205). Pendidik dalam aliran progresivisme berorientasi pada pandangan filsafat eksperimentalis, sehingga secara umum peran

pendidik adalah sebagai fasilitator yang akan membantu peserta didik di dalam mencari cara-cara baru di dalam menyelesaikan proyek mereka masing-masing, dalam arti ketertarikan atau minat mereka atas suatu persoalan (Barnadib, 1997: 205)

Itulah beberapa pandangan pokok mengenai pendidikan menurut aliran progresivisme. Terlepas dari kelemahan yang bisa dijumpai dalam aliran ini, progresivisme pendidikan jelas memiliki beberapa nilai positif yang bisa dipakai sebagai referensi, baik di dalam mengatasi persoalan di bidang pendidikan maupun di dalam mewujudkan sistem pendidikan yang ideal di Indonesia. Bagian selanjutnya, akan menjelaskan mengenai kontribusi aliran pendidikan progresivisme di atas di dalam memecahkan salah satu persoalan pendidikan di Indonesia, yakni mengenai “gagalnya” pembelajaran Pancasila, khususnya di era reformasi sekarang ini.

### **C. Kontribusi Aliran Pendidikan Progresivisme dalam Pengembangan Pendidikan Pancasila**

Selaras dengan pendahuluan yang diangkat di bagian awal tulisan ini, “kegagalan” pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila, adalah salah satu isu yang menyebabkan meredupnya eksistensi Pancasila di era reformasi sekarang ini. Asumsi ini, bagi penulis sangat nyata karena pendidikan Pancasila sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Jika kenyataannya Pancasila tetap belum dapat dipahami dengan cara yang diharapkan, tentu aspek pendidikan memegang peran yang besar dalam persoalan tersebut. Bagi penulis, persoalan yang bisa diidentifikasi sebagai penyebab “kegagalan” pendidikan Pancasila, setidaknya ada pada dua kemungkinan. *Pertama*, kekeliruan dalam hal asumsi ontologis mengenai peserta didik; dan *kedua*, aplikasi dari metode yang tidak sesuai dengan asumsi ontologis pendidikan kita sehingga yang terjadi pendidikan menjadi tidak tepat sasaran karena materi yang diberikan tidak sesuai dengan “wadahnya”.

Terkait dengan persoalan di atas, penulis tidak akan mencoba

*Aliran Pendidikan Progresivisme dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Pendidikan Pancasila di Indonesia*

memecahkan persoalan dari sudut pandang *pertama* karena itu menyangkut kajian mengenai manusia (filsafat manusia) sehingga akan menjadi sangat luas dan berkepanjangan. Penulis, dalam makalah ini akan mencoba menganalisis “kegagalan” pendidikan Pancasila dari sudut pandang *kedua*, yakni dengan menganalisis apakah metode pembelajaran yang selama ini diterapkan di dalam pendidikan Pancasila memang sudah tepat, dalam arti sudah sesuai dengan aspek ontologis peserta didiknya. Kaitannya dengan persoalan ini, penulis nantinya akan mencoba mengatasi kelemahan metode pendidikan Pancasila tersebut dengan mencari sisi positif dari aliran pendidikan yang telah penulis uraikan di bagian sebelumnya, yakni aliran pendidikan progresivisme.

Berbicara mengenai pendidikan Pancasila, bisa dikatakan bahwa dalam proses pendidikan Pancasila, yang terjadi adalah semacam “transfer” kebudayaan dari satu generasi ke generasi penerusnya, mengingat Pancasila adalah sistem nilai yang digali dari kebudayaan

bangsa Indonesia. Pendidik dalam hal ini adalah pihak yang mewakili generasi pewaris, sedangkan murid adalah pihak yang mewakili generasi yang diwarisi. Sampai pada tahapan ini, sebenarnya pendidikan Pancasila bukanlah sesuatu yang salah karena dalam konteks kenegaraan, ideologi bangsa memang perlu dijadikan sebagai materi pendidikan karena ideologi bagaimanapun harus tetap eksis sebagai “filter” yang akan menyaring setiap unsur kebudayaan asing yang masuk; dan sekaligus sebagai “kacamata” yang akan selalu menentukan cara pandang suatu bangsa terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Ideologi dengan demikian sangat diperlukan dalam rangka menjaga tujuan-tujuan negara. Kaitannya dengan Pancasila, bisa disimpulkan bahwa sebagai ideologi, Pancasila memang perlu diwariskan kepada setiap generasi melalui proses pendidikan.

Namun demikian, yang menurut penulis menjadi persoalan utama dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila selama ini, adalah terkait dengan pemilihan metode yang kurang tepat. Melalui analisis fenomenologis sederhana, bisa

diketahui bersama bahwa metode pembelajaran Pancasila, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, adalah berupa pengajaran mimbar, yakni di satu sisi pendidik sangat aktif berbicara di depan kelas mengenai Pancasila, sedangkan di sisi lain, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan dan mencoba memahami materi yang disampaikan oleh pendidik tadi. Bagi penulis, ini adalah satu kesalahan karena metode pembelajaran seperti inilah yang dikritik oleh aliran progresivisme. Pembelajaran yang memberi otoritas yang berlebihan terhadap pendidik dan teks yang disampaikan tidak akan melahirkan kemajuan (*progress*) karena dalam metode semacam ini, banyak kemampuan dan potensi peserta didik yang tidak diberi ruang untuk berkembang.

Satu hal penting yang bisa diambil dari aliran progresivisme pendidikan di dalam pemecahan persoalan pendidikan Pancasila ini adalah mengenai pentingnya menekankan aspek pengalaman dalam proses belajar. Masyarakat kita telah sejak lama mengenal pepatah bahwa “pengalaman adalah

guru yang paling berharga”. Oleh karena itu konsep *learning by doing* yang diusung oleh aliran progresivisme, perlu untuk dicoba diaplikasikan dalam sistem pembelajaran Pancasila, terlebih apabila mengingat isi atau materi Pancasila yang terkait dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Caranya adalah seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu dengan menghadirkan semacam contoh kasus (persoalan) kepada peserta didik, kemudian pendidik memfasilitasi peserta didik terkait dengan bagaimana cara Pancasila melihat kasus tersebut?; atau bagaimana peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam memecahkan persoalan tersebut. Perlu diingat bahwa progresivisme menekankan pentingnya pengalaman di dalam keberhasilan pendidikan, dan pengalaman di sini, tentunya adalah pengalaman sebagaimana yang dialami ketika peserta didik berada pada lingkungan sosial-masyarakat yang sesungguhnya. Oleh karenanya, apabila pendidik ingin menghadirkan suatu kasus, kasus itu adalah kasus

yang benar-benar bisa dialami oleh peserta didik, dalam arti dialami secara empiris, misalnya dalam bentuk adegan. Hal ini penting karena menghadirkan pengalaman secara abstrak atau sebagai ilustrasi, tetap saja akan berbeda karena peserta didik dalam arti itu tidak “mengalami”, melainkan membayangkan. Tentu hasilnya akan berbeda apabila kasus-kasus tersebut benar-benar dihadirkan secara empiris, dalam arti menjadi adegan: peserta didik akan lebih memahami karena dengan mengalami, peserta didik akan lebih memahami situasi sehingga proses belajar pun akan lebih membuahkan hasil.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan kajian fenomenologis yang penulis lakukan terhadap pelaksanaan pendidikan Pancasila di Indonesia, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah, satu persoalan besar yang menyebabkan “gagalnya” pendidikan Pancasila adalah karena pemilihan metode pembelajaran yang kurang tepat. Metode pembelajaran Pancasila dengan cara “kuliah-mimbar”, yang menekankan peran aktif pendidik dengan berceramah di

depan kelas, kiranya memiliki kelemahan. Kelemahannya tidak hanya sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran progresivisme, yaitu bahwa metode semacam ini tidak membawa kemajuan, namun juga lemah karena tidak sesuai dengan materi Pancasila yang meskipun abstrak, sangatlah aplikatif dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Metode ini oleh karenanya perlu disempurnakan dengan “belajar” pada aliran progresivisme pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Pengalaman adalah guru yang paling berharga, oleh karenanya proses belajar perlu mengakomodasi peran pengalaman tersebut dengan menghadirkan contoh kasus yang konkret dan empiris sehingga dengan mengalami, peserta didik akan lebih mengerti dan memahami, sehingga tujuan pendidikan pun bisa tercapai.

Inilah kontribusi utama dari aliran progresivisme yang bisa dipakai di dalam pengajaran pendidikan di Indonesia, termasuk juga dalam pendidikan Pancasila. Aliran progresivisme sebenarnya

memang tidak terlalu banyak berbicara mengenai nilai. Meski demikian, bagi penulis, pentingnya aspek pengalaman sebagaimana yang diusung progresivisme tersebut, tetap bisa diterapkan dalam pendidikan Pancasila (meski Pancasila adalah sistem nilai) karena apa yang penulis ambil dari pemikiran progresivisme pendidikan adalah soal metode dalam pembelajaran. Artinya, apapun materinya, soal metode sebenarnya tetap bisa diterapkan di dalam hal yang berbeda, termasuk soal Pancasila ini. Terlepas dari itu semua, tulisan yang penulis susun ini hanyalah upaya sederhana untuk mencoba memecahkan persoalan besar dalam pendidikan kita, bahkan mungkin persoalan besar dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Sebagai karya yang sederhana, oleh karenanya tentu masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Meski demikian, dengan segala keterbatasan tersebut, penulis yakin bahwa sebagai salah satu aliran yang meramaikan diskursus persoalan pendidikan, progresivisme adalah satu aliran yang beberapa asumsi pokoknya bisa digunakan untuk memperbaiki dan memajukan

kualitas pendidikan di Indonesia.

\*\*\*\*\*

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Barnadib, Imam, 1997, *Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode*, cet. ke-9, Yogyakarta, Andi Offset
- Dardiri, Ahmad, tanpa tahun, "Aspek-Aspek Filsafat dan Kaitannya Dengan Pendidikan", dalam Diktat Filsafat Pendidikan
- Ornstein, Allan C dan Levine, Daniel U, 1985, *An Introduction to the Foundation of Education*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Sastrapratedja, M., 2007, "Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat, Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya" dalam *Memaknai Kembali Pancasila*, Yogyakarta, Badan Penerbitan Filsafat Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan

Penerbit Lima dan Faisal  
Foundation

- \*) Reno Wikandaru, S.Fil., M.Phil, Dosen dan peneliti di Laboratorium Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta